

1. CREDIT - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

2. DEBTOR AND CREDITOR

**SKRIPSI**

KIC  
Per 85/00  
air  
x

*I. Gst. Ngr. Bgs. Airawata*

**EXONERATIE CLAUSULE SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR  
PADA PERJANJIAN KREDIT BANK**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2000**

**EXONERATIE CLAUSULE SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR  
PADA PERJANJIAN KREDIT BANK**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR  
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**

**Lisman Iskandar, S.H., MS.**  
**NIP. 130 675 526**

**Penyusun,**

**I Gst. Ngr. Bgs. Airawata**  
**NIM. 039614320**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2000**

**Panitia Penguji Skripsi :**

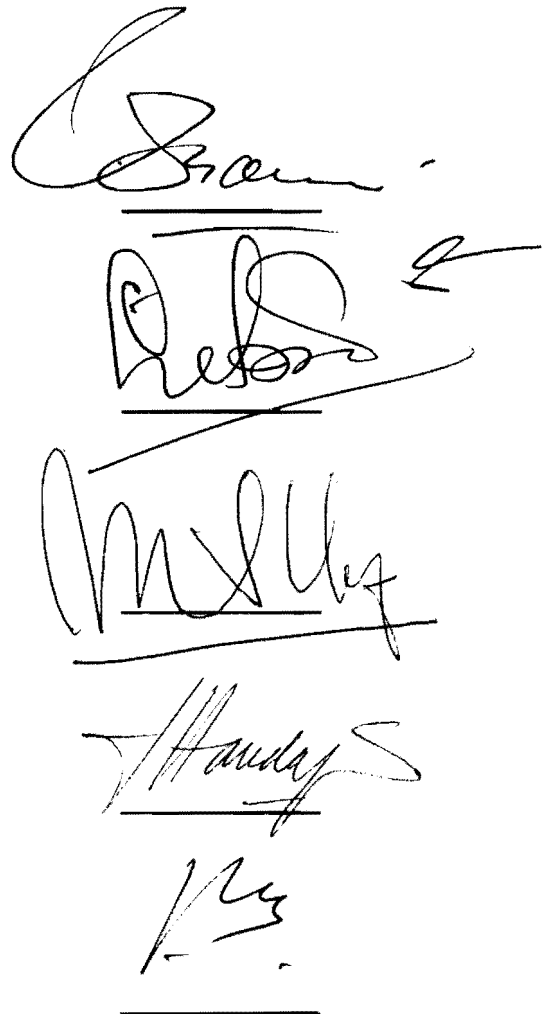
**Ketua : Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS.**

**Anggota : 1. Lisman Iskandar, S.H., MS.**

**2. Hj. Moerdiati Subagyo, S.H., MS.**

**3. Sri Handajani, S.H., M.Hum.**

**4. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**



The image shows five handwritten signatures, each on a separate line, corresponding to the members of the Skripsi Examination Committee listed on the left. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized. The first signature is for Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS. The second is for Lisman Iskandar, S.H., MS. The third is for Hj. Moerdiati Subagyo, S.H., MS. The fourth is for Sri Handajani, S.H., M.Hum. The fifth is for Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan atas pembahasan dari permasalahan yang diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat saya simpulkan sebagai berikut :

- 1) Jadi kata sepakat/kesepakatan itu adalah ada pada perjanjian kredit bank dalam bentuk perjanjian baku, dan tidak boleh dikatakan bahwa kesepakatan yang terjadi disini, akibat adanya unsur terpaksa dimana pihak yang kuat ( bank ) memaksakan kehendaknya pada pihak yang lemah ( pemohon kredit ). Sebab segala keputusan untuk menerima (acceptatie) ataupun menolak terhadap syarat-syarat yang diajukan/ditawarkan ( aanbod, offerte ) oleh bank, sepenuhnya ada di tangan pemohon kredit itu sendiri.
- 2) A). Dilihat dari segi/pihak kreditur ( bank ) itu sendiri pencantuman klausul eksonerasi mempunyai fungsi preventif dan fungsi represif yang berlaku secara bersamaan, maksudnya adalah sebagai tindak pencegahan, yaitu untuk menghindari terjadinya kredit macet, dengan jalan melakukan tindakan represif berupa pelaksanaan klausul-klausul eksonerasi apabila debitur melakukan wanprestasi, ataupun jika bank merasa debitur tidak akan mampu mengembalikan kredit yang telah diterimanya.

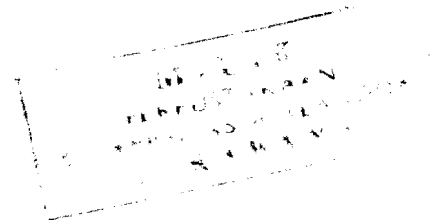
B). Adapun akibat hukum dari pencantuman klausul eksonerasi dalam perjanjian kredit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

❖ Akibat hukum yang menguntungkan bagi kreditur (bank) :

Dengan pencantuman klausul-klausul eksonerasi tersebut bank merasa terlindungi kepentingannya, serta memberikan kepastian hukum bagi bank untuk bertindak sesuai dengan klausul-klausul yang telah disepakati bersama, dimana bank disini berkedudukan sebagai kreditur preferent yang harus didahulukan pelunasan piutangnya daripada kreditur-kreditur yang lainnya.

❖ Akibat hukum yang merugikan kreditur (bank) :

Mengakibatkan bank sangat rentan terhadap gugatan dari nasabah debitur yang ingin melepaskan diri dari klausul tersebut. Seringnya suatu bank digugat oleh nasabah debiturnya dapat berakibat tercemarnya nama baik bank tersebut, yang dapat berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat menyimpan dananya di bank tersebut.



## 2. Saran-Saran

- 1) Seringnya dipergunakan perjanjian kredit dalam bentuk perjanjian baku dalam praktek perbankan, sebaiknya tidak lagi ada pendapat yang menanyakan legalitas dari perjanjian baku tersebut, terutama unsur kesepakatannya. Sebab dalam era globalisasi yang dibutuhkan segala sesuatu yang efisien, cepat dan memudahkan masyarakat. Apabila perjanjian baku masih terus dipermasalahkan maka kita

akan selalu ketinggalan dengan negara lain dalam hal hubungan bisnis yang semakin mengglobal.

- 2) Seringnya digunakan klausul-klausul baku dalam suatu perjanjian bisnis, terutama perjanjian kredit, maka seyogyanya pemerintah segera mengeluarkan ketentuan-ketentuan ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang isi atau materi apa saja yang boleh ataupun dilarang termuat dalam klausul-klausul baku pada suatu formulir perjanjian kredit. Dimana klausul-klausul yang ditetapkan tersebut haruslah berfungsi memberikan perlindungan yang seimbang antara kreditur ( bank ) dengan debitur.